

jurnal papua barat dapus

by Imelda Hutasoit

Submission date: 10-Aug-2020 01:03PM (UTC+1000)

Submission ID: 1357304531

File name: Jurnal_pemekaran_papua_barat.docx (47.21K)

Word count: 3153

Character count: 19835

POTENSI PEMEKARAN PROVINSI PAPUA BARAT DITINJAU DARI ASPEK KEPENDUDUKAN (DEMOGRAFI)

Imelda Hutasoit
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstrak

Aspek kependudukan/demografi adalah aspek yang dipertimbangkan dalam rencana pemekaran/pegabungan suatu wilayah. Aspek Demografi yang dimaksud meliputi kajian kualitas dan kuantitas yang memuat batasan jumlah penduduk minimal dan mutu penduduk, kebutuhan SDM birokrasi dan keseimbangan dan keserasian distribusi penduduk. Berikut ini uraian mengenai aspek kependudukan/demografi yang menjadi pertimbangan dalam pemekaran dan pegabungan wilayah di Provinsi Papua Barat yang didominasi penduduk muda yang sehingga berimplikasi pada besarnya kontribusi jumlah angkatan kerja dan berpeluang untuk terus meningkatkan *supply* tenaga kerja.

Pada tahun 2012 Indeks Pembangunan Manusia ialah sebesar 69,65. IPM tertinggi adalah Kota Sorong (77,72), Kabupaten Fakfak (72,12), dan Kabupaten Kaimana (70,71). Sementara Kabupaten Tambrauw (50,81) merupakan kabupaten yang memiliki IPM paling rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua Barat. Hal itu menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan manusia yang terjadi antara kabupaten. Distribusi penduduk memiliki sebaran yang bervariasi yaitu 0,78 % (terendah) di Kabupaten Tambrauw dan 25,30 % (tertinggi) di Kota Sorong. Terlihat bahwa, Kabupaten Teluk Wondama (28.221 jiwa), Kabupaten Tambrauw (6.395 jiwa) dan Kabupaten Maybrat (35.945 jiwa) belum memenuhi syarat jumlah penduduk minimum untuk pembentukan daerah persiapan yang ditentukan oleh parameter DESARTADA Kementerian Dalam Negeri, begitu pula untuk Kabupaten Pegunungan Arfak (20.495 jiwa) dan Kabupaten Manokwari Selatan (25.859 jiwa) yang merupakan kabupaten pemekaran pada tahun 2012. Namun apabila merujuk pada syarat minimal jumlah penduduk per desa adalah 500 jiwa sehingga jumlah penduduk minimal untuk kabupaten adalah 25.000 jiwa dan untuk kota adalah 20.000 jiwa, maka yang tidak memenuhi syarat minimum hanya kabupaten Tambrauw (6.395) dan kabupaten Pegunungan Arfak (20.495).

Upaya pemekaran Papua Barat sebaiknya diawali dengan pemenuhan jumlah penduduk minimal pada masing masing kabupaten/kota melalui program transmigrasi. Selain itu juga perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM baik berupa aparatur maupun sipil guna mengelola potensi yang ada di Provinsi Papua Barat.

Kata Kunci: Pemekaran, Kependudukan, Indeks Pembangunan Manusia.

Pendahuluan

Perdebatan mengenai bagaimana ukuran yang ideal bagi pemerintahan daerah dan kriterianya berujung pada permasalahan bagaimana restrukturisasi dan reformasi pemerintahan daerah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Restrukturisasi yang umum dilakukan adalah pemekaran dan penggabungan wilayah. Dalam proses tersebut perlu dilakukan penetapan wilayah daerah sebenarnya melalui beberapa pendekatan, antara lain berdasarkan pendekatan fungsi, komunitas/masyarakat, efisiensi, manajemen, teknis, dan sosial. (Campo & Sundaram, 2001). Pendekatan komunitas/masyarakat mengharuskan bahwa batas pemerintahan harus sesuai dengan daerah yang mencerminkan perilaku dan sikap penduduk secara umum. Jadi aspek kependudukan/demografi merupakan salah satu aspek adalah aspek yang dapat dipertimbangkan di dalam pemekaran sebuah daerah. Aspek Demografi yang dimaksud meliputi kajian kualitas dan kuantitas yang memuat batasan jumlah penduduk minimal dan mutu penduduk, kebutuhan SDM birokrasi dan keseimbangan dan keserasian distribusi penduduk.

Pembahasan

Berikut ini uraian mengenai aspek kependudukan/demografi yang menjadi pertimbangan dalam pemekaran atau penggabungan wilayah di Provinsi Papua Barat.

1. Kegiatan Utama Penduduk di Provinsi Papua Barat

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2012 angkatan kerja di Papua Barat terdiri dari 361.597 orang. Hal ini menunjukkan penurunan apabila dibandingkan dengan jumlah di bulan Agustus 2011 yaitu 369.619 orang. Namun pada periode sebelumnya mengalami peningkatan terhadap tahun 2010, dengan angkatan kerja sebanyak 342.888 orang. Berdasarkan tingkat partisipasinya terhadap penduduk usia kerja, Apabila dilihat dari partisipasi penduduk usia kerja Papua Barat memiliki TPAK yang terus meningkat pada periode Agustus. TPAK Papua Barat mencapai 69,29 % (2010) dan 70,78 % (2011). Namun di periode Agustus 2012 TPAK Papua Barat mengalami penurunan menjadi 67,12 persen. Kegiatan utama penduduk di Provinsi Papua Barat tahun 2011 dari total penduduk sebesar 718.013 jiwa yang bekerja sebanyak 336.588 orang. Sebanyak 369.619 jiwa penduduk sebagai angkatan kerja (*labor force*), dan penduduk yang masuk dalam bukan angkatan kerja (*not in the labor force*) mencapai 152.592 jiwa. Sebanyak 33.031 jiwa (8,94%) pengangguran yang merupakan bagian dari angkatan kerja, atau 4,60% dari jumlah total penduduk. Jumlah penduduk usia kerja sebanyak 538.709 jiwa diantaranya sebagai angkatan kerja mencapai 361.597 jiwa, yang bukan angkatan kerja sebanyak 177.112 jiwa. Jumlah pengangguran tahun 2012 mencapai sebesar 19.856 jiwa atau 5,49% yang merupakan bagian dari angkatan kerja. Apabila dihitung dari jumlah total penduduk, maka besarnya pengangguran hanya mencapai 2,38%. Perkembangan indikator ketenagakerjaan tersebut disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 1.

**Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut kegiatan Utama
Agustus 2010-Agustus 2012**

Uraian	Agustus		
	2010	2011	2012
Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas)	494.862	522.211	538.709
Angkatan Kerja	342.888	369.619	361.597
- Bekerja	316.547	336.588	341.741
Sektor Industri (%)	28.88	34.07	35.74
Pertanian (%)	54.04	48.48	46.52
Jasa (%)	17.08	17.45	17.74
- Pengangguran	26.341	33.031	19.856
Bukan Angkatan Kerja	151.974	152.582	177.122
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)	69,29	70,78	67,12
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	7,68	8,94	5,49

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, 2010-2012 dalam Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Papua Barat 2012.

Pengangguran di Papua Barat terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Sebanyak 26.341 orang menganggur di tahun 2010 dan di tahun 2011 terjadi penambahan sebanyak 6.690 orang sehingga menjadi 33.031 orang. Namun kemudian di tahun 2012 jumlah pengangguran menurun drastis menjadi 19.856 orang. Angka TPT Papua Barat pada tahun 2010 adalah 7,68 persen dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 8,94 persen. Angka TPT Papua Barat di tahun 2012 mengalami perbaikan yang sangat signifikan menjadi 5,49 persen. Angka tersebut bermakna bahwa hanya 5 atau 6 orang yang menganggur dari 100 angkatan kerja.

Pada sektor industri terjadi penambahan sebanyak 6.072 dalam setahun, namun sebaliknya pada sektor pertanian terjadi pengurangan tenaga kerja dalam setahun yaitu 4.190 orang. Pada tahun 2010 sebanyak 54,04% dari total pekerja di Papua Barat bekerja di sektor pertanian, kemudian menurun menjadi 48,48 % di tahun 2011 kemudian menurun kembali menjadi 46,52 % di tahun 2012. Selain sektor pertanian sektor jasa memberikan kontribusi terhadap peningkatan pekerja di Papua Barat setelah sektor pertanian. Terdapat peningkatan kontribusi sektor jasa dari 17,08 % pada tahun 2010 menjadi 17,45% pada tahun 2011. Tren positif pada tahun 2012 tersebut terus berlanjut ditandai dengan meningkatnya kontribusi sektor ini menjadi 17,74 persen atau tenaga kerjanya bertambah sebanyak 1.902 orang.

2. Kualitas Penduduk Provinsi Papua Barat

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha dalam memajukan pendidikan Indonesia antara lain dengan program wajib belajar sembilan tahun. Usaha tersebut disertai pemberian layanan dengan biaya terjangkau oleh masyarakat. Sampai pada tahun 2012 Persentase alokasi penyelenggaraan pendidikan di Papua Barat hingga tahun 2012 belum bisa mencapai 20 % sebagaimana yang diundangkan. Terdapat beberapa indikator yang digunakan guna melihat level pendidikan di Papua Barat antara lain :

a. Angka Melek Huruf

Indikator dalam pengukuran level pendidikan adalah level melek huruf. Melek huruf mengindikasikan kemampuan seseorang dalam baca dan tulis. Angka melek huruf pada penelitian ini ialah berdasarkan persentase penduduk pada usia 15 tahun ke atas. Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan melek huruf yaitu dari 93,39 % pada tahun 2010, 93,19 % pada tahun 2011 dan 93,74% pada tahun 2012.

b. Rata-rata Lama Sekolah

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat tahun 2012, Lama sekolah rata-rata di Papua Barat pada tahun 2007 sebesar 7,65; tahun 2008 sebesar 7,67; tahun 2009 sebesar 8,01; tahun 2010 sebesar 8,21; tahun 2011 sebesar 8,26 dan tahun 2012 diperkirakan sebesar 8,45. Data ini menunjukkan rata-rata lama sekolah di Papua Barat semakin meningkat. Pada tahun 2012 rerata lama sekolah di Provinsi Papua Barat ialah sebesar 8,45 yang menunjukkan bahwa mereka bisa menempuh pendidikan sampai kelas 2 SMP.

c. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan banyaknya pendidikan usia sekolah dalam menggunakan fasilitas pendidikan. Meningkatnya APS mengindikasikan keberhasilan dalam sebuah pembangunan khususnya yang terkait jangkauan fasilitas pendidikan. Peningkatan APS terus berlaku di Provinsi Papua setiap tahunnya meski tingkat pendidikannya masih rendah yang ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang berpendidikan SD ke bawah. Sebanyak 43,29 % penduduk Papua Barat yang berusia 10 tahun berpendidikan SD ke bawah. Hal ini menunjukkan penurunan sebesar 19,47 % pada tahun 2012. APS yang meningkat mengindikasikan peningkatan partisipasi penduduk untuk melanjutkan sekolah.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan gabungan indikator sosio ekonomi dalam pembangunan dengan peringkat yang relatif sama untuk semua negara berkembang menggunakan sebuah skala numerik yaitu 0,0 sampai dengan 1,0. IPM sebagai ukuran kualitas hidup. Dimensi itu berupa kesehatan, umur panjang, pengetahuan serta

kehidupan yang layak. IPB di Provinsi Papua Barat terus meningkat seperti yang tertera pada Tabel 10.

²
Tabel 10.

**Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten/Kota
Provinsi Papua Barat**

No.	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2009	2010	2011
	Kabupaten			
01	Fakfak	70,80	71,46 ¹	72,13
02	Kaimana	69,80	70,13 ¹	70,71
03	Teluk Wondama	65,27	65,76	66,06
04	Teluk Bintuni	65,65	66,58	67,17
05	Manokwari	66,02	67,19	67,67
06	Sorong Selatan	66,09	66,31	66,59
07	Sorong	68,16	68,50	68,93
08	Raja Ampat	64,08	64,58	65,06
09	Tambrauw	49,12	50,51	50,81
10	Maybrat	64,89	66,00	66,43
11	Manokwari Selatan	-	-	-
12	Pegunungan Arfak	-	-	-
	Kota			
13	Sorong	76,84	77,18 ¹	77,72
	PAPUA BARAT	64,53	69,15	69,65

Sumber : BPS, 2012

Pada tahun 2012 nilai IPM di atas IPM Provinsi adalah Kota Sorong (77,72), Kabupaten Fakfak (72,12) dan Kabupaten Kaimana (70,71). Selain dua kabupaten dan kota tersebut mempunyai IPM di bawah rata-rata IPM Provinsi di mana IPM Provinsi Papua Barat pada tahun 2012 sebesar 69,65. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tambrauw sebesar 50,81 (2012) mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun begitu masih jauh dari IPM Provinsi Papua Barat dan merupakan kabupaten dengan nilai IPM paling rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Hal itu menunjukkan adanya overlap dalam pembangunan manusia yang terjadi antara kabupaten yang berada di kawasan wilayah pantai dengan yang di wilayah pegunungan Provinsi Papua Barat.

4. Keluarga Sejahtera di Provinsi Papua Barat

Jumlah Keluarga Pra sejahtera terus mengalami penurunan di Papua Barat. Pada tahun 2009 jumlah keluarga pra sejahtera sebanyak 78.124 keluarga pra sejahtera atau 45,97% dari 169.945 rumah tangga; sedangkan pada tahun 2012 menjadi sebanyak 55.721 keluarga pra sejahtera atau 29,38% dari total jumlah rumah tangga (189.650 KK).

5. Kepadatan Penduduk di Provinsi Papua Barat

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2010 merilis data dalam Desain Besar Penataan Daerah (DESARTADA) di Indonesia bahwa Tahun 2010-2025, jumlah penduduk minimum di Papua adalah satu desa = 750 jiwa. Kabupaten sebanyak 37.500 jiwa, Kota sebanyak 30.000 jiwa dan Provinsi sebanyak 187.500 jiwa. Jumlah dan kepadatan penduduk Papua Barat pada tiap Kabupaten/Kota pada tahun 2012 ialah seperti yang tertera pada Tabel 15.

Tabel 15.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kilometer persegi dan per Rumahtangga Menurut Kabupaten Kota Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah		Kepadatan Penduduk		
		Penduduk (jiwa)	Rumah Tangga	Jiwa/Km ²	RT/Km ²	Per RT
Kabupaten						
01. Fakfak	11.036,48	71.069	16.095	6,44	1,46	4,42
02. Kaimana	16.241,84	49.953	12.568	3,08	0,77	3,97
03. Teluk Wondama	3.959,53	28.221	7.004	7,13	1,77	4,03
04. Teluk Bintuni	20.840,83	56.167	14.188	2,70	0,68	3,96
05. Manokwari*)	8.664,76	155.582	48.372	14,17	5,58	4,17
06. Sorong Selatan	3.946,94	41.291	8.545	10,46	2,16	4,83
07. Sorong	7.415,29	73.642	18.449	9,93	2,49	3,99
08. Raja Ampat	8.034,44	45.078	10.089	5,61	1,26	4,47
09. Tambrauw	5.179,65	6.395	1.527	1,23	0,29	4,19
10. Maybrat	5.461,69	35.945	9.453	6,58	1,73	3,80
11. Manokwari Selatan**)	2.773,74	25.859	-	9,32	-	-
12. Pegunungan Arfak**)	2.812,44	20.495	-	7,29	-	-
Kota						
13. Sorong	656,64	206.583	43.360	314,61	66,03	4,76
Papua Barat	97.024,27	816.280	189.650	8,61	1,95	4,30

Sumber : Papua Barat Dalam Angka 2013.

Catatan : *) data setelah pemekaran

***) data tersedia terbatas

Pada data tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk pada tahun 2012 yaitu 816.280 jiwa dengan persentase distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari yang terendah sebesar 0,78 persen di Kabupaten Tambrauw hingga yang tertinggi sebesar 25,30% persen di Kota Sorong. Terlihat bahwa, Kabupaten Teluk Wondama (28.221 jiwa), Kabupaten Tambrauw (6.395 jiwa) dan Kabupaten Maybrat (35.945 jiwa) belum memenuhi syarat jumlah penduduk minimum untuk pembentukan daerah persiapan yang ditentukan oleh parameter DESARTADA Kementerian Dalam Negeri, begitu pula untuk Kabupaten Pegunungan Arfak (20.495 jiwa) dan Kabupaten Manokwari Selatan (25.859 jiwa) yang merupakan kabupaten pemekaran pada tahun 2012 juga belum memenuhi syarat minimal jumlah penduduk yang ditentukan. Namun apabila merujuk pada konsep revisi undang-undang nomor 32 tahun 2004, yang menetapkan syarat minimal jumlah penduduk per desa adalah 500 jiwa sehingga jumlah penduduk minimal untuk kabupaten adalah 25.000 jiwa dan untuk kota adalah 20.000 jiwa, maka yang tidak memenuhi syarat minimum hanya kabupaten Tambrauw (6.395) dan kabupaten Pegunungan Arfak (20.495).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun di Indonesia adalah 1,49%. Sementara rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun di Papua Barat (3,71%) menempati urutan keempat tertinggi setelah provinsi Papua (5,39%), Kepulauan Riau (4,95%) dan Kalimantan Timur (3,81%), dan pada urutan kelima adalah Provinsi Bangka Belitung. Data tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk pertahun di provinsi Papua Barat jauh di atas rata-rata. Data menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun antara tahun 2000-2010 di Papua Barat adalah 3,71% per tahun, maka dapat diperkirakan jumlah penduduk Papua Barat tiga tahun ke depan (tahun 2017) akan berjumlah sekitar 967.360 jiwa dan pada tahun 2019 diperkirakan akan berjumlah 1.053.376 jiwa.

Apabila dibuat proyeksi berdasarkan rumus geometris dan laju pertumbuhan pada masing-masing kabupaten/kota untuk menghitung proyeksi pertambahan penduduk masing-masing kabupaten/kota pada provinsi Papua Barat, maka diperoleh data:

Tabel 16.
Jumlah dan Penduduk Tahun 2012
dan Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2017 dan Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk/ Tahun (%)	Jumlah		
			Penduduk (jiwa) Tahun 2012	Perkiraan Penduduk (jiwa) Tahun 2017	Perkiraan Penduduk (jiwa) Tahun 2019
Kabupaten					
01. Fakfak	11.036,48	2,70	71.069	81.195	85.639
02. Kaimana	16.241,84	4,42	49.953	62.012	67.615

03. Teluk Wondama	3.959,53	3,61	28.221	33.696	36.172
04. Teluk Bintuni	20.840,83	3,53	56.167	66.805	71.605
05. Manokwari	8.664,76	3,97	155.582	189.016	204.322
06. Sorong Selatan .	3.946,94	5,41	41.291	53.735	59.707
07. Sorong	7.415,29	1,17	73.642	78.052	79.889
08. Raja Ampat	8.034,44	2,40	45.078	50.753	53.218
09. Tambrauw	5.179,65	0,38	6.395	6.517	6.567
10. Maybrat .	5.461,69	5,08	35.945	46.050	50.848
11. Manokwari Selatan*)	2.773,74	3,97	25.859	31.416	33.960
12. Pegunungan Arfak*)	2.812,44	3,97	20.495	24.899	26.915
Kota					
13. Sorong	656,64	4,80	206.583	261.156	286.829
Papua Barat	97.024,27	3,71	816.280	979.360	1.053.376

Sumber : Papua Barat Dalam Angka 2013 dan perhitungan proyeksi jumlah penduduk

Catatan : *) data disesuaikan dengan kabupaten induk

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa dengan laju pertumbuhan penduduk Papua Barat yaitu 3,71% per tahun akan memberikan pertambahan jumlah penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, hanya saja peningkatan tersebut tidak secara merata terdistribusi di semua kabupaten/kota. Merujuk kepada syarat yang ditentukan DESARTADA Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan bahwa jumlah penduduk minimal untuk daerah Papua adalah 37.500 orang/kabupaten dan 30.000 orang/kota, maka pada tiga tahun ke depan (tahun 2017), masih terdapat 4 (empat) kabupaten yang memiliki jumlah penduduk di bawah jumlah minimal yang ditentukan, yaitu Kabupaten Teluk Wondama (33.696 jiwa), Kabupaten Tambrauw (6.517 jiwa), Kabupaten Manokwari Selatan (31.416 jiwa) dan Kabupaten Pegunungan Arfak (20.495 jiwa), sedangkan kabupaten Maybrat (46.050 jiwa) sudah memenuhi syarat tersebut. Pada 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2019, walaupun diperkirakan telah ada pertambahan jumlah penduduk jika dibandingkan tahun 2017, namun pertambahan tersebut tidak cukup signifikan untuk memenuhi syarat minimal ketentuan, dimana 4 (empat) kabupaten tersebut tetap memiliki jumlah penduduk yang kurang, yaitu Kabupaten Teluk Wondama (36.172 jiwa), Kabupaten Tambrauw (6.567 jiwa), Kabupaten Manokwari Selatan (33.960 jiwa) dan Kabupaten Pegunungan Arfak (26.915 jiwa).

Namun apabila merujuk pada konsep revisi undang-undang nomor 32 tahun 2004, yang menetapkan syarat minimal jumlah penduduk per desa adalah 500 jiwa sehingga jumlah penduduk minimal untuk kabupaten adalah 25.000 jiwa dan untuk kota adalah 20.000 jiwa, pada tahun 2017 kabupaten Pegunungan Arfak (24.899 jiwa) belum memiliki jumlah penduduk yang cukup, tetapi pada tahun 2019 Kabupaten Pegunungan Arfak (26.915 jiwa) telah memenuhi syarat jumlah penduduk minimal. Lain halnya dengan kabupaten Tambrauw yang hingga lima tahun ke depan (tahun 2019) tetap tidak memenuhi syarat jumlah penduduk minimal.

Dalam upaya agar penduduk dapat menikmati pembangunan dan pelayanan pemerintah yang maksimal, hendaknya pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, namun karena kondisi geografis Papua Barat yang sangat luas, sehingga pemekaran wilayah dibutuhkan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pemekaran wilayah membutuhkan berbagai pertimbangan dan salah satunya adalah jumlah minimal penduduk pada setiap wilayah. Berdasarkan syarat minimal yang ditentukan DESARTADA Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan bahwa jumlah penduduk minimal untuk daerah Papua adalah 187.500 jiwa/provinsi, maka jumlah penduduk Papua Barat secara keseluruhan memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran menjadi dua Propinsi, karena Papua Barat diperkirakan pada tahun 2019 akan memiliki jumlah penduduk 1.053.376 jiwa. Namun kendalanya adalah penyebaran penduduk yang tidak merata, karena sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari, sehingga diperlukan upaya pemerataan distribusi penduduk terutama pada wilayah yang masih berada di bawah ketentuan syarat minimal jumlah penduduk.

6. Kesimpulan

Kondisi faktual Provinsi Papua Barat saat ini dengan wilayah seluas 97.024,37 km², dan jumlah penduduk sebanyak 789.013 jiwa (tahun 2011), dengan tingkat kepadatan 8,13 jiwa per km². Pada tahun 2012 dengan jumlah penduduk mencapai 816.280 jiwa dengan kepadatan penduduk 8,61 jiwa per kilometer persegi serta susunan administrasi pemerintahan yang terdiri dari 12 kab, 1 kota, 162 distrik (kecamatan), 1321 kampung (desa), pendidikan penduduk rata-rata Sekolah Dasar dan sederajat (lama sekolah 7,67 tahun pada tahun 2008), jumlah usia kerja mencapai 538.709 orang dan pengangguran sebanyak 19.856 orang dan jumlah Keluarga Sejahtera Plus hanya sebanyak 4.899 KK, dan jumlah penduduk miskin yang tinggi (26,67%); dengan demikian hal tersebut dapat memberikan gambaran bagaimana beratnya beban penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Provinsi Papua Barat.

Pemekaran Provinsi Papua Barat sebaiknya dilakukan jika dengan terjadinya pemekaran akan berdampak positif terhadap peningkatan dan pemerataan pembangunan dan pelayanan umum. Penduduk memegang peranan sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan jumlah penduduk dipengaruhi oleh pertumbuhan alami, dan migrasi penduduk. Jumlah penduduk yang memadai, baik dalam segi kuantitas maupun segi kualitasnya menjadi syarat utama untuk menunjang terselenggaranya pemerintah yang baik.

Secara total jumlah penduduk memenuhi untuk dimekarkan, tetapi secara regional kabupaten perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan jumlah penduduknya melalui migrasi (transmigrasi), karena secara alami pertumbuhan penduduk di Papua Barat cukup tinggi tetapi pertumbuhan alami tersebut belum dapat meningkatkan jumlah penduduk secara signifikan. Oleh karena itu, disarankan pemerintah daerah mengundang penduduk dari kabupaten atau kota lain, terutama dari Pulau Jawa atau daerah lain untuk bertransmigrasi ke Papua Barat guna membangun tanah Papua Barat yang sangat luas, dan sangat kaya raya akan sumberdaya alamnya tetapi miskin sumber daya manusianya.

Papua Barat memiliki potensi pada bidang lingkungan hidup, pertambangan, kehutanan, serta kelautan dan perikanan yang sangat potensial. Dalam upaya pengelolaan dan pengembangan potensi tersebut diperlukan sumber daya manusia baik sumber daya aparatur maupun sumber daya masyarakat secara umum yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, karena selama ini masih kurang. Dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, perlu dilakukan rekrutmen, pelatihan dan penyediaan pendidikan berkaitan dengan bidang-bidang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- ⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. 2013. *Papua Barat Dalam Angka*. <http://papuabarat.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. 2012. *Papua Barat Dalam Angka*. <http://papuabarat.bps.go.id/>
- Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 2012. ² *Survei Angkatan Kerja Nasional, 2010-2012 dalam Indikator Makro Ekonomi dan Sosial*
- Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat. *SUSENAS, 2010-2012 dalam IPM Provinsi Papua Barat 2012*.
- ²⁰ Riyadi Masykur. 2000. *Pembangunan Daerah Melalui Pengembangan Wilayah*.
- ¹⁶ Rosidin, Utang. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia
- ⁵ Salvatore schiavo-Campo and P.S.A Sundaram. 2001. *To Serve and To Preserve: Improving Public Administration in A Competitive World*. Asian Development Bank

jurnal papua barat dapus

ORIGINALITY REPORT

21 %

SIMILARITY INDEX

19 %

INTERNET SOURCES

3 %

PUBLICATIONS

9 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

docplayer.info

Internet Source

10 %

2

www.scribd.com

Internet Source

2 %

3

es.scribd.com

Internet Source

1 %

4

**Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya**

Student Paper

1 %

5

aipi-politik.org

Internet Source

1 %

6

irjabar.bps.go.id

Internet Source

1 %

7

pt.scribd.com

Internet Source

1 %

8

Submitted to iGroup

Student Paper

1 %

9

eprints.uns.ac.id

Internet Source

<1%

10

chairulbasrun.blogspot.com

Internet Source

<1%

11

fr.scribd.com

Internet Source

<1%

12

Sigit Puji Winarko, Puji Astuti. JURNAL
NUSANTARA APLIKASI MANAJEMEN BISNIS,
2018

Publication

<1%

13

desamadura.blogspot.com

Internet Source

<1%

14

Submitted to Universitas Andalas

Student Paper

<1%

15

trihanifa.blogspot.com

Internet Source

<1%

16

id.123dok.com

Internet Source

<1%

17

mpira.ub.uni-muenchen.de

Internet Source

<1%

18

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<1%

19

anzdoc.com

Internet Source

<1%

20 Puji Astuti, Mardianto Manan, Febby Asteriani, Cihe Aprilia Bintang, Dharfrimadil Akhyar. "Chapter 44 The Prospective Analysis of Coastal Town Development Based on Waterfront City (Case Study: Banten Sub-District, Bengkalis–Riau Province)", Springer Science and Business Media LLC, 2017
Publication

21 Submitted to School of Business and Management ITB
Student Paper

22 Submitted to Pascasarjana Universitas Negeri Malang
Student Paper

23 Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Student Paper

24 repository.ung.ac.id
Internet Source

25 Submitted to Universitas Terbuka
Student Paper

26 Submitted to Universitas Diponegoro
Student Paper

27 Submitted to Universitas Negeri Makassar
Student Paper

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off